



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
  - b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka pemanfaatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Kabupaten/Kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diarahkan untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan SD/SDLB dan SMP, pengadaan meubelair perpustakaan SD/SDLB dan SMP, penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB dan SMP, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP, dan rehabilitasi ruang kelas (RRK) SMP.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



MOHAMMAD NUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Kabupaten/Kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diarahkan untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan SD/SDLB dan SMP, pengadaan meubelair perpustakaan SD/SDLB dan SMP, penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB dan SMP, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP, dan rehabilitasi ruang kelas (RRK) SMP.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



MOHAMMAD NUH 

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TANGGAL 1 FEBRUARI 2010

PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan dana alokasi khusus bidang pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Alokasi DAK bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 9.334.882.000.000,- (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan proporsi alokasi nasional 60% untuk jenjang SD/SDLB dan 40% untuk jenjang SMP.

Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN HIBAH/BLOCKGRANT KE SEKOLAH

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - a. Pasal 49 ayat (3), menentukan: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
  - b. Pasal 51 ayat (1) menentukan: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah";

- c. Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang berbentuk badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan:
  - a. Pasal 4 ayat (1), menentukan: ”Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan”;
  - b. Pasal 4 ayat (2) huruf a menentukan: “Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik”;
  - c. Pasal 40 ayat (5), menentukan: ”Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Badan Hukum Pendidikan diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan”;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan :
  - a. Pasal 83 ayat (1) menentukan: “Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  - b. Pasal 83 ayat (2) menentukan: “Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah”.
  - c. Pasal 83 ayat (3) menentukan: “Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan”.
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007:
  - a. Pasal 6 huruf b, menentukan: “Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola”.

- b. Pasal 39 ayat (1), menentukan: "Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri".
  - c. Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan: "Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
    - 1). Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
    - 2). Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
    - 3). Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran".
  - d. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan: "Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah :
- a. Pasal 33 ayat (1), menentukan: "DAK Bidang Pendidikan dialokasikan melalui mekanisme belanja hibah pada sekolah berdasarkan pertimbangan:
    - 1) mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan DAK;
    - 2) melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam rangka pengendalian dan pengawasan keuangan DAK;
    - 3) mengatasi rentang kendali pelaksanaan pengelolaan DAK;
    - 4) menggerakkan roda perekonomian melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan DAK.
  - b. Pasal 33 ayat (6), menentukan: "Kepala Sekolah selaku penerima hibah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dan realisasi keuangan di satuan sekolah yang dipimpinnya".
  - c. Pasal 33 ayat (7), menentukan: "Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah".

## B. Tujuan dan Manfaat:

Penetapan kebijakan penggunaan DAK bidang pendidikan melalui hibah ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel;
2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan;
3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

## C. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.
2. Sasaran program DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 meliputi SD/SDLB dan SMP baik negeri maupun swasta.
3. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diarahkan untuk:  
(a) pembangunan ruang/gedung perpustakaan SD/SDLB dan SMP serta pengadaan meubelair perpustakaan; (b) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB dan SMP; (c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP; dan (d) rehabilitasi ruang kelas SMP.
4. DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dengan jumlah Rp. 9.334.882.000.000 secara Nasional dialokasikan sebagai berikut:
  - a. Jenjang SD/SDLB sebesar 60% (Rp. 5.600.929.200.000);
  - b. Jenjang SMP sebesar 40% (Rp. 3.733.952.800.000).
5. Untuk jenjang SD/SDLB, DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 digunakan seluruhnya untuk peningkatan mutu, yang meliputi:
  - a. Pembangunan prasarana pendidikan berupa ruang/gedung perpustakaan dan meubelair sebesar  $\pm$  (lebih kurang) 30%;
  - b. Penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sebesar lebih kurang 70%.
6. Untuk jenjang SMP, DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 digunakan untuk kegiatan, yang meliputi:
  - a. Pembangunan prasarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang, pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan ruang/gedung perpustakaan sebesar 30%;
  - b. Penyediaan buku perpustakaan sebesar 35%; dan
  - c. Penyediaan alat pendidikan sebesar 35%.

7. DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diberikan secara langsung dalam bentuk hibah kepada satuan pendidikan (SD/SDLB dan SMP) dan dilaksanakan secara swakelola, dengan melibatkan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS).
8. Biaya pembangunan ruang/gedung perpustakaan SD/SDLB dan SMP, pembangunan/rehabilitasi ruang SMP, dihitung berdasarkan harga satuan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah setempat yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

### III. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

#### A. Penyaluran Dana

1. DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah tanpa ada potongan dalam bentuk apapun.
4. Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening sekolah mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan batas waktu kegiatan, pelaporan, dan saat pemanfaatannya.
5. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diselesaikan oleh sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Pelaksanaan DAK

1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2010.

### IV. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SD/SDLB

Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 terdiri dari 2 (dua) paket, yaitu :

- Paket 1 : diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki ruang/gedung perpustakaan berikut parabol meubelairnya dan belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan.

Paket 2 : diperuntukkan bagi sekolah yang telah memiliki ruang/gedung perpustakaan namun belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan.

Setiap sekolah penerima DAK bidang pendidikan SD/SDLB hanya berhak mendapatkan salah satu paket.

A. DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB (Paket 1):

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan SD/SDLB Paket 1, meliputi:
  - a. Pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotan meubelair; dan
  - b. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:
    - 1) Buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik;
    - 2) Alat peraga pendidikan, dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan; dan
    - 3) Sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan dan multimedia interaktif.
2. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) bagi daerah dengan IKK = 1.
3. Proporsi pendanaan kegiatan pada butir 2 di atas, untuk alokasi per sekolah bersumber dari (1) DAK (APBN) bidang pendidikan proporsi sebesar 90%; dan (2) kabupaten/kota (APBD) minimal sebesar 10 %.
4. Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1, apabila menurut hasil perhitungan, dengan biaya satuan tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan biaya pembangunan ruang/gedung perpustakaan.
5. Pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 SD/SDLB paket 1, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

B. DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB (Paket 2):

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 SD/SDLB Paket 2 adalah untuk penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan yang meliputi:
  - a. Buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik;
  - b. Alat peraga pendidikan, dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan; dan
  - c. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan dan multimedia interaktif.
2. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. Proporsi pendanaan kegiatan pada butir 2 di atas, untuk alokasi per sekolah bersumber dari : (1) DAK (APBN) bidang pendidikan sebesar 90%; dan (2) kabupaten/kota (APBD) minimal sebesar 10 %.
4. Pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 SD/SDLB paket 2, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

V. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan terdiri atas :
  - a. 30% untuk peningkatan prasarana;
  - b. 35% untuk penyediaan buku; dan
  - c. 35% untuk penyediaan alat pendidikan.
2. Komponen kegiatan yang termasuk dalam peningkatan prasarana pendidikan adalah:
  - a. penambahan RKB untuk menambah akses;
  - b. penambahan RKB untuk menuju rasio kelas : siswa = 1 : 32 orang;
  - c. pembangunan ruang perpustakaan; dan
  - d. rehabilitasi sedang dan berat.
3. Komponen kegiatan yang termasuk dalam penyediaan buku perpustakaan adalah :
  - a. buku pengayaan;
  - b. buku panduan pendidik; dan
  - c. buku referensi.
4. Komponen peningkatan alat pendidikan adalah pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran, terdiri atas :
  - a. alat laboratorium IPA;
  - b. alat laboratorium bahasa;
  - c. alat peraga matematika;
  - d. alat peraga IPS;
  - e. alat olahraga; dan
  - f. alat kesenian.

5. Komposisi 30:35:35 adalah komposisi biaya dalam seluruh kegiatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan untuk satu sekolah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Pengalokasian dana per sekolah untuk program peningkatan sarana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
7. Penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 diprioritaskan untuk merehabilitasi ruang kelas SMP yang mengalami kerusakan, pembangunan RKB untuk penambahan akses dan rasio kelas : siswa 1:32 dan pembangunan ruang perpustakaan SMP beserta isinya. Prioritas selanjutnya adalah untuk pengadaan alat pembelajaran.
8. Untuk program pengadaan alat dan buku, sekolah mendapatkan program DAK berdasarkan paket-paket sebagai berikut :
  - a. Paket 1 sebesar Rp 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pengadaan buku sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pengadaan seluruh alat sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - b. Paket 2 sebesar Rp 150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pengadaan buku sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pengadaan seluruh alat kecuali alat laboratorium bahasa sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan
  - c. Paket 3 sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan seluruhnya untuk pengadaan buku.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

## VI. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK

- A. Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai DAK adalah:
  1. administrasi kegiatan;
  2. penyiapan kegiatan fisik;
  3. penelitian;
  4. pelatihan; dan
  5. perjalanan dinas.

- B. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, seperti izin mendirikan bangunan, konsultan dan sebagainya tidak dapat dibiayai dari DAK bidang pendidikan.
- C. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tersebut, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

## VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### A. Pemerintah Provinsi

- 1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan;
- 2. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; dan
- 3. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

### B. Pemerintah Kabupaten/Kota

- 1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 3. Menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah up. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar untuk SD/SDLB dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk SMP, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
- 4. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dengan kepala sekolah penerima DAK;
- 5. Menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima DAK melalui PPKD; dan
- 6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota.

### C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
2. Membentuk tim seleksi dan pengawas untuk pengadaan komponen sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan;
3. Memberikan bimbingan teknis yang cukup dalam pengelolaan keuangan DAK bidang pendidikan;
4. Untuk SD/SDLB, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
5. Untuk SMP: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rencana alokasi jumlah SMP yang akan menerima DAK per kecamatan dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK tahun 2010 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
7. Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; dan
9. Melaporkan pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 kepada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah up. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

### D. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dalam konteks program DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

#### E. Kepala Sekolah

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan pejabat pengelola keuangan daerah;
3. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan; dan
5. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah.

#### F. Komite Sekolah

Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu : (a) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat.

### VIII. SISTEM PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN SANKSI

#### A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat.

##### 1. Laporan Tingkat Sekolah

- a. Ketua panitia membuat laporan bulanan dan laporan akhir.

###### 1) Laporan Bulanan

Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional

###### 2) Laporan Akhir

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh,

serta melampirkan foto hasil pembangunan/rehabilitasi (0%), (50%), dan (100%) pelaksanaan kegiatan. Di dalam laporan akhir, agar disertakan juga file foto kegiatan dalam CD.

- b. Laporan ketua panitia disampaikan kepada Kepala Sekolah.
2. Laporan Kepala Sekolah  
Berdasar laporan panitia, Kepala Sekolah menyusun laporan bulanan dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan;
  3. Laporan Kabupaten/kota
    - a. Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan kepada:
      - 1) Menteri Keuangan;
      - 2) Menteri Pendidikan Nasional; dan
      - 3) Menteri Dalam Negeri.
    - b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
    - c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Pemantauan dan Evaluasi  
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan yang mengarahkan pengelola DAK bidang pendidikan ke suatu produk, produsen, agen, pemasok barang tertentu dalam proses pengadaan barang dan/atau melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat:

- a. Sanksi administratif diberikan apabila pengelola/kepala sekolah/aparat pemerintah daerah melakukan pelanggaran administrasi;
- b. Sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan apabila pengelola/kepala sekolah/aparat pemerintah daerah/komite sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

2. Sanksi Kepada Kabupaten/kota:

- a. Pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang dapat dikenai sanksi hukum oleh aparat hukum terkait.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK bidang pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



MOHAMMAD NUH *u-2 9. Surat -*

3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.



## SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TANGGAL 1 FEBRUARI 2010

## KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

## BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010

*(dalam juta rupiah)*

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
I	<b>Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</b>	<b>289,618.10</b>	<b>161,185.20</b>	<b>128,432.90</b>
1	Kab. Aceh Barat	10,546.20	6,060.40	4,485.80
2	Kab. Aceh Besar	15,008.40	8,775.60	6,232.80
3	Kab. Aceh Selatan	11,486.90	7,059.60	4,427.30
4	Kab. Aceh Singkil	11,803.00	6,585.60	5,217.40
5	Kab. Aceh Tengah	11,771.10	6,224.00	5,547.10
6	Kab. Aceh Tenggara	13,032.10	6,442.90	6,589.20
7	Kab. Aceh Timur	19,724.40	11,754.60	7,969.80
8	Kab. Aceh Utara	31,454.70	18,836.90	12,617.80
9	Kab. Bireuen	19,173.30	11,405.60	7,767.70
10	Kab. Pidie	17,471.50	10,855.20	6,616.30
11	Kab. Simeulue	9,541.40	5,128.50	4,412.90
12	Kota Banda Aceh	8,206.30	4,087.50	4,118.80
13	Kota Sabang	7,671.30	4,092.80	3,578.50
14	Kota Langsa	8,997.80	4,435.90	4,561.90
15	Kota Lhokseumawe	8,117.20	3,221.90	4,895.30
16	Kab. Nagan Raya	10,781.20	5,208.10	5,573.10
17	Kab. Aceh Jaya	7,879.00	5,653.80	2,225.20
18	Kab. Aceh Barat Daya	9,760.80	4,885.70	4,875.10
19	Kab. Gayo Lues	7,686.40	3,800.40	3,886.00
20	Kab. Aceh Tamiang	15,287.00	8,470.50	6,816.50
21	Kab. Bener Meriah	10,212.00	4,968.10	5,243.90
22	Kab. Pidie Jaya	13,329.60	7,245.40	6,084.20
23	Kota Subulussalam	10,676.50	5,986.20	4,690.30
II	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>703,992.50</b>	<b>378,667.90</b>	<b>325,324.60</b>
24	Kab. Asahan	23,271.00	12,712.80	10,558.20
25	Kab. Dairi	20,139.00	11,907.10	8,231.90
26	Kab. Deli Serdang	49,987.70	30,499.40	19,488.30
27	Kab. Tanah Karo	22,218.90	13,853.30	8,365.60
28	Kab. Labuhan Batu	23,340.50	8,718.90	14,621.60
29	Kab. Langkat	34,315.10	16,438.90	17,876.20
30	Kab. Mandailing Natal	31,941.40	18,677.70	13,263.70
31	Kab. Nias	28,147.60	9,062.60	19,085.00
32	Kab. Simalungun	37,374.30	21,824.20	15,550.10
33	Kab. Tapanuli Selatan	19,751.20	8,710.50	11,040.70
34	Kab. Tapanuli Tengah	29,855.40	14,300.00	15,555.40
35	Kab. Tapanuli Utara	26,955.60	16,400.40	10,555.20
36	Kab. Toba Samosir	24,358.10	9,950.30	14,407.80
37	Kota Binjai	15,458.70	5,004.40	10,454.30
38	Kota Medan	35,120.80	22,461.30	12,659.50
39	Kota Pematang Siantar	10,772.20	4,928.90	5,843.30
40	Kota Sibolga	8,684.00	3,449.90	5,234.10
41	Kota Tanjung Balai	9,440.20	3,512.80	5,927.40
42	Kota Tebing Tinggi	8,039.80	3,892.10	4,147.70
43	Kota Padang Sidempuan	9,332.50	4,167.70	5,164.80
44	Kab. Pakpak Bharat	7,637.30	3,543.30	4,094.00
45	Kab. Nias Selatan	42,052.80	17,141.10	24,911.70
46	Kab. Humbang Hasundutan	12,244.70	6,587.20	5,657.50
47	Kab. Serdang Bedagai	32,412.30	19,942.50	12,469.80

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
48	Kab. Samosir	20,941.30	10,876.90	10,064.40
49	Kab. Batu Bara	20,683.20	11,958.20	8,725.00
50	Kab. Padang Lawas	21,676.50	7,835.20	13,841.30
51	Kab. Padang Lawas Utara	16,545.00	11,768.90	4,776.10
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	11,841.60	9,788.60	2,053.00
53	Kab. Labuhan Batu Utara	13,015.10	11,082.50	1,932.60
54	Kab. Nias Utara	13,820.70	10,897.90	2,922.80
55	Kab. Nias Barat	11,233.20	8,310.40	2,922.80
56	Kota Gunung Sitoli	11,384.80	8,462.00	2,922.80
III	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>285,162.80</b>	<b>175,457.70</b>	<b>109,705.10</b>
57	Kab. Lima puluh Kota	23,869.20	15,750.80	8,118.40
58	Kab. Agam	24,264.00	17,649.60	6,614.40
59	Kab. Kepulauan Mentawai	7,694.40	5,421.30	2,273.10
60	Kab. Padang Pariaman	24,053.70	17,144.40	6,909.30
61	Kab. Pasaman	11,345.60	7,138.20	4,207.40
62	Kab. Pesisir Selatan	26,396.70	18,468.50	7,928.20
63	Kab. Sijunjung	11,368.30	5,734.80	5,633.50
64	Kab. Solok	24,035.50	15,265.20	8,770.30
65	Kab. Tanah Datar	22,651.40	13,093.90	9,557.50
66	Kota Bukit Tinggi	8,166.40	3,472.20	4,694.20
67	Kota Padang Panjang	6,315.80	3,123.60	3,192.20
68	Kota Padang	24,726.80	13,061.60	11,665.20
69	Kota Payakumbuh	3,212.60	3,212.60	
70	Kota Sawahlunto	7,047.50	3,498.90	3,548.60
71	Kota Solok	7,428.90	3,776.80	3,652.10
72	Kota Pariaman	8,921.00	4,806.20	4,114.80
73	Kab. Pasaman Barat	20,463.20	12,482.50	7,980.70
74	Kab. Dharmasraya	13,992.30	7,635.60	6,356.70
75	Kab. Solok Selatan	9,209.50	4,721.00	4,488.50
IV	<b>Provinsi Riau</b>	<b>49,823.50</b>	<b>40,454.70</b>	<b>9,368.80</b>
76	Kab. Bengkalis			
77	Kab. Indragiri Hilir			
78	Kab. Indragiri Hulu			
79	Kab. Kampar	19,268.00	19,268.00	
80	Kab. Kuantan Singingi	11,085.90	6,521.70	4,564.20
81	Kab. Pelalawan			
82	Kab. Rokan Hilir			
83	Kab. Rokan Hulu	19,469.60	14,665.00	4,804.60
84	Kab. Siak			
85	Kota Dumai			
86	Kota Pekanbaru			
87	Kab. Meranti			
V	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>32,642.00</b>	<b>18,546.80</b>	<b>14,095.20</b>
88	Kab. Bintan			
89	Kab. Natuna	8,123.30	4,273.80	3,849.50
90	Kab. Karimun			
91	Kota Batam	16,953.60	10,440.00	6,513.60
92	Kota Tanjung Pinang			
93	Kab. Lingga			
94	Kab. Anambas	7,565.10	3,833.00	3,732.10
VI	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>228,092.40</b>	<b>97,513.30</b>	<b>130,579.10</b>
95	Kab. Batanghari	21,980.00	10,620.00	11,360.00
96	Kab. Bungo	33,013.20	6,479.10	26,534.10
97	Kab. Kerinci	23,092.20	12,582.50	10,509.70
98	Kab. Merangin	28,966.50	13,589.00	15,377.50
99	Kab. Muaro Jambi	21,114.90	8,817.40	12,297.50

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
100	Kab. Sarolangun	21,487.00	11,024.90	10,462.10
101	Kab. Tanjung Jabung Barat			
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	20,401.90	10,677.90	9,724.00
103	Kab. Tebo	20,476.30	9,277.10	11,199.20
104	Kota Jambi	21,052.60	6,402.40	14,650.20
105	Kota Sungai Penuh	16,507.80	8,043.00	8,464.80
VII	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>240,766.50</b>	<b>138,852.10</b>	<b>101,914.40</b>
106	Kab. Lahat	22,517.40	15,815.90	6,701.50
107	Kab. Musi Banyuasin	30,980.90	18,283.90	12,697.00
108	Kab. Musi Rawas	17,592.50	12,390.50	5,202.00
109	Kab. Muara Enim			
110	Kab. Ogan Komering Ilir	26,583.80	16,521.60	10,062.20
111	Kab. Ogan Komering Ulu			
112	Kota Palembang	12,240.70		12,240.70
113	Kota Pagar Alam	8,912.00	4,897.80	4,014.20
114	Kota Lubuk Linggau	10,174.60	4,531.80	5,642.80
115	Kota Prabumulih	8,463.00	4,082.20	4,380.80
116	Kab. Banyuasin	29,165.40	18,398.00	10,767.40
117	Kab. Ogan Ilir	15,528.30	7,728.90	7,799.40
118	Kab. OKU Timur	26,727.50	16,554.90	10,172.60
119	Kab. OKU Selatan	19,291.70	11,496.40	7,795.30
120	Kab. Empat Lawang	12,588.70	8,150.20	4,438.50
VIII	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>63,717.00</b>	<b>32,876.80</b>	<b>30,840.20</b>
121	Kab. Bangka	11,035.20	6,523.80	4,511.40
122	Kab. Belitung	9,161.70	4,718.70	4,443.00
123	Kota Pangkal Pinang	8,192.20	3,768.00	4,424.20
124	Kab. Bangka Selatan	9,062.70	4,395.90	4,666.80
125	Kab. Bangka Tengah	8,298.90	3,732.80	4,566.10
126	Kab. Bangka Barat	8,821.40	4,912.70	3,908.70
127	Kab. Belitung Timur	9,144.90	4,824.90	4,320.00
IX	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>157,995.00</b>	<b>72,728.80</b>	<b>85,266.20</b>
128	Kab. Bengkulu Selatan	17,095.40	7,335.30	9,760.10
129	Kab. Bengkulu Utara	16,713.70	7,628.40	9,085.30
130	Kab. Rejang Lebong	24,212.10	9,026.10	15,186.00
131	Kota Bengkulu	13,725.60	4,368.50	9,357.10
132	Kab. Kaur	15,660.00	8,474.60	7,185.40
133	Kab. Seluma	17,900.10	10,097.20	7,802.90
134	Kab. Mukomuko	13,304.20	6,884.00	6,420.20
135	Kab. Lebong	10,991.60	5,962.90	5,028.70
136	Kab. Kepahiang	10,970.60	4,354.70	6,615.90
137	Kab. Bengkulu Tengah	17,421.70	8,597.10	8,824.60
X	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>300,805.30</b>	<b>175,601.50</b>	<b>125,203.80</b>
138	Kab. Lampung Barat	11,440.10	9,536.80	1,903.30
139	Kab. Lampung Selatan	30,691.90	22,537.30	8,154.60
140	Kab. Lampung Tengah	54,051.70	31,318.30	22,733.40
141	Kab. Lampung Utara	44,725.40	18,373.10	26,352.30
142	Kab. Lampung Timur	38,145.10	23,484.40	14,660.70
143	Kab. Tanggamus	34,377.30	20,356.00	14,021.30
144	Kab. Tulang Bawang	12,329.20		12,329.20
145	Kab. Way Kanan	15,409.30	15,409.30	
146	Kota Bandar Lampung	15,972.00	7,160.90	8,811.10
147	Kota Metro	7,967.60	3,151.10	4,816.50
148	Kab. Pesawaran	22,460.80	15,380.80	7,080.00
149	Kab. Pringsewu	13,234.90	8,893.50	4,341.40
150	Kab. Mesuji			
151	Kab. Tulang Bawang Barat			

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
XI	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>			
XII	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1,038,093.90</b>	<b>662,987.10</b>	<b>375,106.80</b>
152	Kab. Bandung	77,075.10	54,083.80	22,991.30
153	Kab. Bekasi	53,234.60	32,772.40	20,462.20
154	Kab. Bogor	97,434.90	62,749.70	34,685.20
155	Kab. Ciamis	58,688.20	40,753.90	17,934.30
156	Kab. Cianjur	68,131.40	48,495.60	19,635.80
157	Kab. Cirebon	54,455.70	37,615.70	16,840.00
158	Kab. Garut	77,658.80	56,497.50	21,161.30
159	Kab. Indramayu	60,907.20	36,399.40	24,507.80
160	Kab. Karawang	66,958.80	38,320.40	28,638.40
161	Kab. Kuningan	52,470.20	30,363.00	22,107.20
162	Kab. Majalengka	37,017.40	18,644.20	18,373.20
163	Kab. Purwakarta	25,954.40	19,119.20	6,835.20
164	Kab. Subang	28,750.90	19,879.10	8,871.80
165	Kab. Sukabumi	53,053.40	35,203.00	17,850.40
166	Kab. Sumedang	36,150.30	24,129.70	12,020.60
167	Kab. Tasikmalaya	28,380.00	11,986.20	16,393.80
168	Kota Bandung	46,360.10	28,320.30	18,039.80
169	Kota Bekasi			
170	Kota Bogor			
171	Kota Cirebon	9,099.90	4,186.30	4,913.60
172	Kota Depok	26,552.30	14,313.50	12,238.80
173	Kota Sukabumi	9,906.10	4,123.40	5,782.70
174	Kota Cimahi	9,422.60	4,760.60	4,662.00
175	Kota Tasikmalaya	13,051.30	6,756.30	6,295.00
176	Kota Banjar	3,975.50	3,975.50	
177	Kab. Bandung Barat	43,404.80	29,538.40	13,866.40
XIII	<b>Provinsi Banten</b>	<b>211,454.10</b>	<b>109,919.50</b>	<b>101,534.60</b>
178	Kab. Lebak	56,593.50	35,076.60	21,516.90
179	Kab. Pandeglang	55,191.10	36,906.60	18,284.50
180	Kab. Serang	29,271.40	14,501.30	14,770.10
181	Kab. Tangerang	43,397.70	15,782.50	27,615.20
182	Kota Cilegon			
183	Kota Tangerang			
184	Kota Serang	27,000.40	7,652.50	19,347.90
185	Kota Tangerang Serang			
XIV	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>1,117,476.30</b>	<b>731,045.70</b>	<b>386,430.60</b>
186	Kab. Banjarnegara	35,953.60	25,435.50	10,518.10
187	Kab. Banyumas	46,156.00	35,180.00	10,976.00
188	Kab. Batang	20,569.60	12,056.40	8,513.20
189	Kab. Blora	56,200.20	24,898.60	31,301.60
190	Kab. Boyolali	33,256.10	22,145.10	11,111.00
191	Kab. Brebes	32,711.50	32,711.50	
192	Kab. Cilacap	68,390.80	34,474.30	33,916.50
193	Kab. Demak	32,004.40	22,744.60	9,259.80
194	Kab. Grobogan	39,331.70	28,642.60	10,689.10
195	Kab. Jepara	36,798.00	27,364.30	9,433.70
196	Kab. Karanganyar	31,470.70	20,326.30	11,144.40
197	Kab. Kebumen	40,422.90	31,808.20	8,614.70
198	Kab. Kendal	33,817.30	22,607.90	11,209.40
199	Kab. Klaten	45,182.30	32,630.00	12,552.30
200	Kab. Kudus	19,045.40	19,045.40	
201	Kab. Magelang	70,561.50	16,665.40	53,896.10
202	Kab. Pati	33,471.00	23,719.80	9,751.20
203	Kab. Pekalongan	38,323.70	24,435.20	13,888.50
204	Kab. Pemasang	39,776.80	30,939.70	8,837.10

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
205	Kab. Purbalingga	24,293.10	17,622.40	6,670.70
206	Kab. Purworejo	33,614.90	22,889.80	10,725.10
207	Kab. Rembang	23,118.50	15,612.40	7,506.10
208	Kab. Semarang	22,720.60	13,089.90	9,630.70
209	Kab. Sragen	28,386.70	18,423.00	9,963.70
210	Kab. Sukoharjo	27,782.50	18,480.50	9,302.00
211	Kab. Tegal	41,307.30	30,017.50	11,289.80
212	Kab. Temanggung	24,625.70	11,403.20	13,222.50
213	Kab. Wonogiri	38,976.90	31,758.50	7,218.40
214	Kab. Wonosobo	30,005.60	19,210.20	10,795.40
215	Kota Magelang	6,474.50	3,359.30	3,115.20
216	Kota Pekalongan	8,153.40	4,490.30	3,663.10
217	Kota Salatiga	8,385.10	3,991.40	4,393.70
218	Kota Semarang	14,151.20	14,151.20	
219	Kota Surakarta	18,784.80	12,169.60	6,615.20
220	Kota Tegal	13,252.00	6,545.70	6,706.30
XV	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>173,395.20</b>	<b>64,357.30</b>	<b>109,037.90</b>
221	Kab. Bantul	36,938.70	11,331.20	25,607.50
222	Kab. Gunung Kidul	53,128.60	23,655.40	29,473.20
223	Kab. Kulon Progo	22,845.60	10,174.10	12,671.50
224	Kab. Sleman	50,143.50	19,196.60	30,946.90
225	Kota Yogyakarta	10,338.80		10,338.80
XVI	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>1,037,652.30</b>	<b>712,233.90</b>	<b>325,418.40</b>
226	Kab. Bangkalan	40,984.00	30,453.50	10,530.50
227	Kab. Banyuwangi	44,218.90	30,686.50	13,532.40
228	Kab. Blitar	36,672.30	27,356.70	9,315.60
229	Kab. Bojonegoro	35,897.60	23,799.00	12,098.60
230	Kab. Bondowoso	31,964.90	22,148.50	9,816.40
231	Kab. Gresik	14,786.90	14,786.90	
232	Kab. Jember	51,280.40	31,517.00	19,763.40
233	Kab. Jombang	32,653.90	21,599.80	11,054.10
234	Kab. Kediri	36,984.90	27,923.10	9,061.80
235	Kab. Lamongan	39,041.50	26,726.40	12,315.10
236	Kab. Lumajang	37,886.60	25,692.20	12,194.40
237	Kab. Madiun	24,995.20	18,781.60	6,213.60
238	Kab. Magetan	28,223.50	21,624.90	6,598.60
239	Kab. Malang	51,835.90	24,961.50	26,874.40
240	Kab. Mojokerto	28,494.10	19,464.20	9,029.90
241	Kab. Nganjuk	34,032.70	28,027.10	6,005.60
242	Kab. Ngawi	33,535.50	22,349.20	11,186.30
243	Kab. Pacitan	29,044.00	19,496.80	9,547.20
244	Kab. Pamekasan	27,809.60	12,544.80	15,264.80
245	Kab. Pasuruan	41,983.60	30,130.50	11,853.10
246	Kab. Ponorogo	35,540.90	27,163.70	8,377.20
247	Kab. Probolinggo	25,282.80	25,282.80	
248	Kab. Sampang	35,054.00	23,866.80	11,187.20
249	Kab. Sidoarjo	33,752.00	22,673.50	11,078.50
250	Kab. Situbondo	17,633.70	11,350.80	6,282.90
251	Kab. Sumenep	27,995.80	16,898.70	11,097.10
252	Kab. Trenggalek	33,813.50	17,586.10	16,227.40
253	Kab. Tuban	13,704.40	13,704.40	
254	Kab. Tulungagung	28,176.10	28,176.10	
255	Kota Blitar	6,168.40	3,079.40	3,089.00
256	Kota Kediri			
257	Kota Madiun	7,727.50	3,515.10	4,212.40
258	Kota Malang			

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
259	Kota Mojokerto	8,416.40	2,836.10	5,580.30
260	Kota Pasuruan	6,846.20	2,988.00	3,858.20
261	Kota Probolinggo	8,125.60	3,974.60	4,151.00
262	Kota Surabaya	39,903.70	25,890.90	14,012.80
263	Kota Batu	7,185.30	3,176.70	4,008.60
XVII	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>248,656.10</b>	<b>176,555.80</b>	<b>72,100.30</b>
264	Kab. Bengkayang	15,472.70	8,502.50	6,970.20
265	Kab. Landak	22,415.80	20,519.00	1,896.80
266	Kab. Kapuas Hulu	20,100.20	13,698.40	6,401.80
267	Kab. Ketapang	19,047.60	12,597.10	6,450.50
268	Kab. Pontianak	14,790.20	11,511.00	3,279.20
269	Kab. Sambas	26,692.00	19,357.80	7,334.20
270	Kab. Sanggau	32,693.60	24,992.80	7,700.80
271	Kab. Sintang	24,507.80	18,848.60	5,659.20
272	Kota Pontianak	11,318.20	6,359.20	4,959.00
273	Kota Singkawang	9,162.00	4,617.20	4,544.80
274	Kab. Sekadau	11,343.90	6,676.00	4,667.90
275	Kab. Melawi	9,510.50	7,527.30	1,983.20
276	Kab. Kayong Utara	10,761.00	5,210.70	5,550.30
277	Kab. Kubu Raya	20,840.60	16,138.20	4,702.40
XVIII	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>124,641.30</b>	<b>79,946.10</b>	<b>44,695.20</b>
278	Kab. Barito Selatan	9,842.20	6,351.50	3,490.70
279	Kab. Barito Utara	10,802.10	6,007.40	4,794.70
280	Kab. Kapuas	18,013.00	18,013.00	
281	Kab. Kotawaringin Barat			
282	Kab. Kotawaringin Timur			
283	Kota Palangkaraya	10,051.70	4,232.60	5,819.10
284	Kab. Barito Timur	9,785.30	5,541.90	4,243.40
285	Kab. Murung Raya			
286	Kab. Pulang Pisau	12,568.90	6,603.10	5,965.80
287	Kab. Gunung Mas	13,136.50	8,650.90	4,485.60
288	Kab. Lamandau	8,861.10	5,382.70	3,478.40
289	Kab. Sukamara	6,086.40	2,972.50	3,113.90
290	Kab. Katingan	16,399.80	10,588.30	5,811.50
291	Kab. Seruyan	9,094.30	5,602.20	3,492.10
XIX	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>271,205.00</b>	<b>114,963.90</b>	<b>156,241.10</b>
292	Kab. Banjar	33,061.70	15,863.90	17,197.80
293	Kab. Barito Kuala	28,819.80	11,413.50	17,406.30
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	21,864.40	11,568.70	10,295.70
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	18,198.60	8,188.20	10,010.40
296	Kab. Hulu Sungai Utara	19,962.00	10,312.30	9,649.70
297	Kab. Kota Baru	16,041.70		16,041.70
298	Kab. Tabalong	22,082.60	12,607.40	9,475.20
299	Kab. Tanah Laut	32,978.90	12,504.70	20,474.20
300	Kab. Tapin	14,401.10	5,875.10	8,526.00
301	Kota Banjar Baru	9,458.70	3,062.40	6,396.30
302	Kota Banjarmasin	20,392.70	4,834.20	15,558.50
303	Kab. Balangan	14,960.50	8,614.90	6,345.60
304	Kab. Tanah Bumbu	18,982.30	10,118.60	8,863.70
XX	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>37,003.70</b>	<b>18,343.60</b>	<b>18,660.10</b>
305	Kab. Berau			
306	Kab. Bulungan			
307	Kab. Kutai Kartanegara			
308	Kab. Kutai Barat	17,477.30	9,536.50	7,940.80
309	Kab. Kutai Timur			
310	Kab. Malinau	7,960.00	3,269.60	4,690.40

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
311	Kab. Nunukan	11,566.40	5,537.50	6,028.90
312	Kab. Pasir			
313	Kota Balikpapan			
314	Kota Bontang			
315	Kota Samarinda			
316	Kota Tarakan			
317	Kab. Penajam Paser Utara			
318	Kab. Tana Tidung			
XXI	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>261,283.90</b>	<b>137,368.10</b>	<b>123,915.80</b>
319	Kab. Bolaang Mongondow	16,561.40	8,816.70	7,744.70
320	Kab. Minahasa	19,694.00	9,907.90	9,786.10
321	Kab. Sangihe	21,045.70	9,221.40	11,824.30
322	Kota Bitung	11,309.60	4,705.00	6,604.60
323	Kota Manado	13,687.70	11,173.50	2,514.20
324	Kab. Kepulauan Talaud	16,656.60	8,244.80	8,411.80
325	Kab. Minahasa Selatan	21,160.50	8,742.70	12,417.80
326	Kota Tomohon	8,964.40	3,708.80	5,255.60
327	Kab. Minahasa Utara	19,732.10	10,743.10	8,989.00
328	Kota Kotamobagu	23,400.50	12,279.90	11,120.60
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	17,937.20	10,189.80	7,747.40
330	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	17,182.80	10,640.00	6,542.80
331	Kab. Minahasa Tenggara	13,126.70	6,056.90	7,069.80
332	Kab. Bolaang Mangondow Timur	21,490.60	12,084.10	9,406.50
333	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	19,334.10	10,853.50	8,480.60
XXII	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>96,773.90</b>	<b>45,087.70</b>	<b>51,686.20</b>
334	Kab. Boalemo	13,607.60	5,908.50	7,699.10
335	Kab. Gorontalo	30,338.60	15,252.10	15,086.50
336	Kota Gorontalo	11,142.30	5,362.30	5,780.00
337	Kab. Pohuwato	12,394.60	5,049.10	7,345.50
338	Kab. Bone Bolango	15,565.60	7,507.00	8,058.60
339	Kab. Gorontalo Utara	13,725.20	6,008.70	7,716.50
XXIII	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>154,409.80</b>	<b>118,421.00</b>	<b>35,988.80</b>
340	Kab. Banggai	19,211.50	17,222.00	1,989.50
341	Kab. Banggai Kepulauan	12,938.90	9,038.60	3,900.30
342	Kab. Buol	10,432.40	10,432.40	
343	Kab. Toli-Toli	13,508.20	8,615.70	4,892.50
344	Kab. Donggala	22,907.40	17,576.20	5,331.20
345	Kab. Morowali	16,125.90	13,983.70	2,142.20
346	Kab. Poso	10,851.90	7,682.70	3,169.20
347	Kota Palu	11,385.50	5,578.90	5,806.60
348	Kab. Parigi Moutong	12,663.10	10,898.30	1,764.80
349	Kab. Tojo Una Una	14,786.40	10,141.20	4,645.20
350	Kab. Sigi	9,598.60	7,251.30	2,347.30
XXIV	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>453,138.50</b>	<b>281,911.20</b>	<b>171,227.30</b>
351	Kab. Bantaeng	11,032.00	5,570.80	5,461.20
352	Kab. Barru	12,195.10	6,890.00	5,305.10
353	Kab. Bone	33,579.50	22,123.20	11,456.30
354	Kab. Bulukumba	25,403.70	17,332.00	8,071.70
355	Kab. Enrekang	12,196.20	7,418.50	4,777.70
356	Kab. Gowa	27,601.10	17,925.70	9,675.40
357	Kab. Jeneponto	20,270.20	14,445.90	5,824.30
358	Kab. Luwu	24,314.90	12,820.00	11,494.90
359	Kab. Luwu Utara	14,900.10	7,859.80	7,040.30
360	Kab. Maros	22,075.30	13,314.80	8,760.50
361	Kab. Pangkajene Kepulauan	19,990.70	13,677.70	6,313.00
362	Kab. Pinrang	22,891.50	16,091.90	6,799.60

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
363	Kab. Selayar	10,485.50	6,563.50	3,922.00
364	Kab. Sidenreng Rappang	18,083.90	12,297.40	5,786.50
365	Kab. Sinjai	14,812.20	8,268.00	6,544.20
366	Kab. Soppeng	17,855.20	12,465.90	5,389.30
367	Kab. Takalar	20,044.30	12,265.50	7,778.80
368	Kab. Tana Toraja	19,274.80	12,328.40	6,946.40
369	Kab. Wajo	26,342.30	18,851.70	7,490.60
370	Kota Pare-pare	10,484.20	4,420.90	6,063.30
371	Kota Makassar	29,522.30	17,667.30	11,855.00
372	Kota Palopo	10,009.90	4,522.20	5,487.70
373	Kab. Luwu Timur	10,305.80	5,231.20	5,074.60
374	Kab. Toraja Utara	19,467.80	11,558.90	7,908.90
XXV	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>78,782.10</b>	<b>48,618.30</b>	<b>30,163.80</b>
375	Kab. Majene	12,638.30	8,252.50	4,385.80
376	Kab. Mamuju	17,449.40	11,194.70	6,254.70
377	Kab. Polewali Mandar	21,361.20	14,742.20	6,619.00
378	Kab. Mamasa	17,516.70	9,495.00	8,021.70
379	Kab. Mamuju Utara	9,816.50	4,933.90	4,882.60
XXVI	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>227,650.10</b>	<b>100,286.90</b>	<b>127,363.20</b>
380	Kab. Buton	26,787.10	9,039.40	17,747.70
381	Kab. Konawe	31,687.10	16,795.20	14,891.90
382	Kab. Kolaka	23,804.20	9,074.70	14,729.50
383	Kab. Muna	27,384.10	16,715.60	10,668.50
384	Kota Kendari	13,752.80	5,858.10	7,894.70
385	Kota Bau-bau	12,582.00	4,150.50	8,431.50
386	Kab. Konawe Selatan	21,823.10	9,590.90	12,232.20
387	Kab. Bombana	16,765.00	6,177.30	10,587.70
388	Kab. Wakatobi	15,336.60	5,713.70	9,622.90
389	Kab. Kolaka Utara	11,464.00	5,559.80	5,904.20
390	Kab. Konawe Utara	12,533.60	5,462.20	7,071.40
391	Kab. Buton Utara	13,730.50	6,149.50	7,581.00
XXVII	<b>Provinsi Bali</b>	<b>187,453.20</b>	<b>84,403.40</b>	<b>103,049.80</b>
392	Kab. Badung			
393	Kab. Bangli	15,120.70	9,243.00	5,877.70
394	Kab. Buleleng	42,854.20	17,393.30	25,460.90
395	Kab. Gianyar	25,916.00	12,538.30	13,377.70
396	Kab. Jembrana	16,599.10	6,732.00	9,867.10
397	Kab. Karangasem	34,153.70	16,465.30	17,688.40
398	Kab. Klungkung	16,344.20	7,336.40	9,007.80
399	Kab. Tabanan	26,214.30	14,695.10	11,519.20
400	Kota Denpasar	10,251.00		10,251.00
XXVIII	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>204,620.40</b>	<b>141,500.40</b>	<b>63,120.00</b>
401	Kab. Bima	25,638.90	17,815.30	7,823.60
402	Kab. Dompu	16,792.50	9,713.60	7,078.90
403	Kab. Lombok Barat	20,010.50	16,274.30	3,736.20
404	Kab. Lombok Tengah	32,340.60	22,791.30	9,549.30
405	Kab. Lombok Timur	34,430.50	30,054.90	4,375.60
406	Kab. Sumbawa	28,058.00	17,824.50	10,233.50
407	Kota Mataram	12,633.00	7,016.10	5,616.90

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
408	Kota Bima	11,417.70	5,743.60	5,674.10
409	Kab. Sumbawa Barat	10,866.30	5,961.00	4,905.30
410	Kab. Lombok Utara	12,432.40	8,305.80	4,126.60
XXIX	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>309,846.20</b>	<b>214,005.10</b>	<b>95,841.10</b>
411	Kab. Alor	15,657.60	8,369.80	7,287.80
412	Kab. Belu	25,514.10	18,455.30	7,058.80
413	Kab. Ende	13,461.20	10,951.80	2,509.40
414	Kab. Flores Timur	13,728.20	10,474.40	3,253.80
415	Kab. Kupang	17,159.10	10,645.30	6,513.80
416	Kab. Lembata	10,434.80	7,382.10	3,052.70
417	Kab. Manggarai	17,395.40	14,211.40	3,184.00
418	Kab. Ngada	15,066.10	9,255.00	5,811.10
419	Kab. Sikka	15,676.60	12,792.20	2,884.40
420	Kab. Sumba Barat	15,991.00	9,607.50	6,383.50
421	Kab. Sumba Timur	18,918.20	13,982.60	4,935.60
422	Kab. Timor Tengah Selatan	21,165.70	13,951.40	7,214.30
423	Kab. Timor Tengah Utara	11,659.30	8,904.60	2,754.70
424	Kota Kupang	11,841.40	4,774.00	7,067.40
425	Kab. Rote Ndao	12,498.90	6,214.20	6,284.70
426	Kab. Manggarai Barat	7,838.60	7,838.60	
427	Kab. Nagekeo	10,549.20	7,692.40	2,856.80
428	Kab. Sumba Barat Daya	18,443.80	10,891.90	7,551.90
429	Kab. Sumba Tengah	9,959.50	6,496.50	3,463.00
430	Kab. Manggarai Timur	19,570.90	16,558.80	3,012.10
431	Kab. Sabu Raijua	7,316.60	4,555.30	2,761.30
XXX	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>155,307.60</b>	<b>93,513.40</b>	<b>61,794.20</b>
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	12,791.40	6,994.90	5,796.50
433	Kab. Maluku Tengah	26,488.20	15,355.20	11,133.00
434	Kab. Maluku Tenggara	11,138.90	7,647.20	3,491.70
435	Kab. Pulau Buru	14,985.90	8,641.50	6,344.40
436	Kota Ambon	15,374.20	7,852.00	7,522.20
437	Kab. Seram Bagian Barat	14,071.80	9,118.60	4,953.20
438	Kab. Seram Bagian Timur	10,881.50	5,822.80	5,058.70
439	Kab. Kepulauan Aru	7,003.20	7,003.20	
440	Kota Tual	15,569.70	8,868.90	6,700.80
441	Kab. Maluku Barat Daya	16,141.30	11,501.40	4,639.90
442	Kab. Buru Selatan	10,861.50	4,707.70	6,153.80
XXXI	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>83,426.90</b>	<b>65,104.30</b>	<b>18,322.60</b>
443	Kab. Halmahera Tengah	5,359.00	5,359.00	
444	Kab. Halmahera Barat	10,409.10	7,797.80	2,611.30
445	Kota Ternate	10,484.50	6,213.00	4,271.50
446	Kab. Halmahera Timur	8,461.70	5,779.50	2,682.20
447	Kota Tidore Kepulauan	8,415.50	6,345.80	2,069.70
448	Kab. Kepulauan Sula	6,662.40	6,662.40	
449	Kab. Halmahera Selatan	16,545.50	9,857.60	6,687.90
450	Kab. Halmahera Utara	10,349.90	10,349.90	
451	Kab. Pulau Morotai	6,739.30	6,739.30	
XXXII	<b>Provinsi Papua</b>	<b>417,447.20</b>	<b>243,397.10</b>	<b>174,050.10</b>
452	Kab. Biak Numfor	15,068.50	9,359.10	5,709.40
453	Kab. Jayapura	13,868.70	7,178.20	6,690.50
454	Kab. Jayawijaya	22,979.00	10,268.50	12,710.50
455	Kab. Merauke	21,735.90	15,052.30	6,683.60
456	Kab. Mimika	9,529.30	6,654.80	2,874.50
457	Kab. Nabire	9,397.80	6,241.10	3,156.70
458	Kab. Paniai	13,333.20	9,867.90	3,465.30
459	Kab. Puncak Jaya	12,829.80	7,418.60	5,411.20

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
460	Kab. Kepulauan Yapen	12,907.90	7,436.70	5,471.20
461	Kota Jayapura	13,804.90	6,794.50	7,010.40
462	Kab. Sarmi	7,235.60	4,581.70	2,653.90
463	Kab. Keerom	13,479.70	5,874.70	7,605.00
464	Kab. Yahukimo	11,447.60	7,233.20	4,214.40
465	Kab. Pegunungan Bintang	15,182.20	9,149.60	6,032.60
466	Kab. Tolikara	11,330.30	5,815.50	5,514.80
467	Kab. Boven Digoel	9,595.30	6,769.40	2,825.90
468	Kab. Mappi	9,130.00	5,641.80	3,488.20
469	Kab. Asmat	12,122.50	8,867.90	3,254.60
470	Kab. Waropen	12,547.60	6,026.90	6,520.70
471	Kab. Supiori	10,310.80	4,929.60	5,381.20
472	Kab. Mamberamo Raya	5,013.10	3,253.10	1,758.90
473	Kab. Membramo Tengah	32,394.10	18,773.70	13,620.40
474	Kab. Yalimo	28,982.10	14,588.00	14,394.10
475	Kab. Lanny Jaya	29,532.00	19,176.30	10,355.70
476	Kab. Nduga	25,477.60	14,431.70	11,045.90
477	Kab. Puncak	14,403.10	8,362.60	6,040.50
478	Kab. Dogiyai	8,958.40	5,730.10	3,228.30
479	Kab. Intan Jaya	7,430.60	3,965.30	3,465.30
480	Kab. Deiyai	7,419.60	3,954.30	3,465.30
<b>XXXIII</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>92,549.20</b>	<b>65,074.60</b>	<b>27,474.60</b>
481	Kab. Sorong	7,433.40	4,340.60	3,092.80
482	Kab. Manokwari	18,499.70	15,972.30	2,527.40
483	Kab. Fak Fak	8,182.90	5,697.30	2,485.60
484	Kota Sorong	4,254.50	4,254.50	
485	Kab. Sorong Selatan	7,793.10	5,933.20	1,859.90
486	Kab. Raja Ampat	11,388.60	7,311.90	4,076.70
487	Kab. Teluk Bintuni	7,073.70	4,107.00	2,966.70
488	Kab. Teluk Wondama	6,156.50	4,057.00	2,099.50
489	Kab. Kaimana	7,535.30	4,664.70	2,870.60
490	Kab. Maybrat	7,911.00	5,163.30	2,747.70
491	Kab. Tambrau	6,320.50	3,572.80	2,747.70
<b>TOTAL NASIONAL (Rp)</b>		<b>9,334,880.90</b>	<b>5,600,929.20</b>	<b>3,733,951.70</b>

9 334.882.00

3.733.952.80

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



MOHAMMAD NUH

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
460	Kab. Kepulauan Yapen	12,907.90	7,436.70	5,471.20
461	Kota Jayapura	13,804.90	6,794.50	7,010.40
462	Kab. Sarmi	7,235.60	4,581.70	2,653.90
463	Kab. Keerom	13,479.70	5,874.70	7,605.00
464	Kab. Yahukimo	11,447.60	7,233.20	4,214.40
465	Kab. Pegunungan Bintang	15,182.20	9,149.60	6,032.60
466	Kab. Tolikara	11,330.30	5,815.50	5,514.80
467	Kab. Boven Digoel	9,595.30	6,769.40	2,825.90
468	Kab. Mappi	9,130.00	5,641.80	3,488.20
469	Kab. Asmat	12,122.50	8,867.90	3,254.60
470	Kab. Waropen	12,547.60	6,026.90	6,520.70
471	Kab. Supiori	10,310.80	4,929.60	5,381.20
472	Kab. Mamberamo Raya	<del>5,012.00</del>	3,253.10	<del>1,758.90</del>
473	Kab. Mamberamo Tengah	32,394.10	18,773.70	13,620.40
474	Kab. Yalimo	28,982.10	14,588.00	14,394.10
475	Kab. Lanny Jaya	29,532.00	19,176.30	10,355.70
476	Kab. Nduga	25,477.60	14,431.70	11,045.90
477	Kab. Puncak	14,403.10	8,362.60	6,040.50
478	Kab. Dogiyai	8,958.40	5,730.10	3,228.30
479	Kab. Intan Jaya	7,430.60	3,965.30	3,465.30
480	Kab. Deiyai	7,419.60	3,954.30	3,465.30
<b>XXXIII</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>92,549.20</b>	<b>65,074.60</b>	<b>27,474.60</b>
481	Kab. Sorong	7,433.40	4,340.60	3,092.80
482	Kab. Manokwari	18,499.70	15,972.30	2,527.40
483	Kab. Fak Fak	8,182.90	5,697.30	2,485.60
484	Kota Sorong	4,254.50	4,254.50	
485	Kab. Sorong Selatan	7,793.10	5,933.20	1,859.90
486	Kab. Raja Ampat	11,388.60	7,311.90	4,076.70
487	Kab. Teluk Bintuni	7,073.70	4,107.00	2,966.70
488	Kab. Teluk Wondama	6,156.50	4,057.00	2,099.50
489	Kab. Kaimana	7,535.30	4,664.70	2,870.60
490	Kab. Maybrat	7,911.00	5,163.30	2,747.70
491	Kab. Tambrauw	6,320.50	3,572.80	2,747.70
<b>TOTAL NASIONAL (Rp)</b>		<b>9,334,880.98</b>	<b>5,600,929.20</b>	<b>3,733,951.70</b>

9.334.882.00

3.733.952.80

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



MOHAMMAD NUH

NO	DAERAH	Pendidikan		
		TOTAL (Rp)	Alokasi SD (Rp)	Alokasi SMP (Rp)
460	Kab. Kepulauan Yapen	12,907.90	7,436.70	5,471.20
461	Kota Jayapura	13,804.90	6,794.50	7,010.40
462	Kab. Sarmi	7,235.60	4,581.70	2,653.90
463	Kab. Keerom	13,479.70	5,874.70	7,605.00
464	Kab. Yahukimo	11,447.60	7,233.20	4,214.40
465	Kab. Pegunungan Bintang	15,182.20	9,149.60	6,032.60
466	Kab. Tolikara	11,330.30	5,815.50	5,514.80
467	Kab. Boven Digoel	9,595.30	6,769.40	2,825.90
468	Kab. Mappi	9,130.00	5,641.80	3,488.20
469	Kab. Asmat	12,122.50	8,867.90	3,254.60
470	Kab. Waropen	12,547.60	6,026.90	6,520.70
471	Kab. Supiori	10,310.80	4,929.60	5,381.20
472	Kab. Mamberamo Raya	5,013.10	3,253.10	1,760.00
473	Kab. Membramo Tengah	32,394.10	18,773.70	13,620.40
474	Kab. Yalimo	28,982.10	14,588.00	14,394.10
475	Kab. Lanny Jaya	29,532.00	19,176.30	10,355.70
476	Kab. Nduga	25,477.60	14,431.70	11,045.90
477	Kab. Puncak	14,403.10	8,362.60	6,040.50
478	Kab. Dogiyai	8,958.40	5,730.10	3,228.30
479	Kab. Intan Jaya	7,430.60	3,965.30	3,465.30
480	Kab. Deiyai	7,419.60	3,954.30	3,465.30
XXXIII	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>92,549.20</b>	<b>65,074.60</b>	<b>27,474.60</b>
481	Kab. Sorong	7,433.40	4,340.60	3,092.80
482	Kab. Manokwari	18,499.70	15,972.30	2,527.40
483	Kab. Fak Fak	8,182.90	5,697.30	2,485.60
484	Kota Sorong	4,254.50	4,254.50	
485	Kab. Sorong Selatan	7,793.10	5,933.20	1,859.90
486	Kab. Raja Ampat	11,388.60	7,311.90	4,076.70
487	Kab. Teluk Bintuni	7,073.70	4,107.00	2,966.70
488	Kab. Teluk Wondama	6,156.50	4,057.00	2,099.50
489	Kab. Kaimana	7,535.30	4,664.70	2,870.60
490	Kab. Maybrat	7,911.00	5,163.30	2,747.70
491	Kab. Tambrauw	6,320.50	3,572.80	2,747.70
<b>TOTAL NASIONAL (Rp)</b>		<b>9,334,882.00</b>	<b>5,600,929.20</b>	<b>3,733,952.80</b>

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
MOHAMMAD NUH**

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003